Pertimbangan Penyidik Dalam Menentukan Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Balikpapan, Kalimantan Timur)

(Investigator Consideration in Order to Define the Solution Model of Child Crime (Study in Polres Balikpapan, Kalimantan Timur))

Belny Warlansyah

*Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail:fhunmul@gmail.com*

ABSTRAKSI

Realitas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Balikpapan pada tahun 2013 sebanyak 51 tindak pidana. Sebanyak 18 perkara diselesaikan melalui model diversifikasi, sedangkan sisanya 33 perkara diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Sedangkan pada Tahun 2014, yang terjadi hanya 10 perkara. Artinya mengalami penurunan angka kejahatan (*criminal rate*) yang cukup signifikan dibandingkan perkara yang terjadi pada Tahun 2013. Dari 10 perkara tersebut, sebanyak enam perkara diantaranya dilanjutkan dalam proses peradilan selanjutnya setelah penyidikan, artinya dilakukan penuntutan dan persidangan, sedangkan sisanya sebanyak empat perkara dilakukan dengan diversifikasi. Faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan atau tindak pidana, diantaranya faktor lingkungan, penyebab lainnya adalah adanya kemudahan anak untuk mengakses informasi tentang hubungan seksual yang bersifat pornografi, yang kemudian mendorong nafsu syahwatnya untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan di luar nikah dengan pacarnya. Kontrol sosial yang rendah dari masyarakat juga menjadi faktor penyebab anak mudah melakukan kejahatan, karena kurangnya pengawasan dari orang tua, keluarga dan masyarakat. Dalam menangani perkara tindak pidana anak, model penyelesaian perkaranya meliputi diversifikasi atau melanjutkan perkara ke tahap penyidikan selanjutnya.

Kata Kunci: penyidik, anak, dan diversifikasi

ABSTRACT

Criminal or crime which is done by child in Polres Balikpapan in year 2013 as many as 51 Cases. 18 Cases is finished by diversion Model, the rest of 33 Cases is finished by Court. In year 2014, the crime happened is only 10 cases, meaning that there is a significant declining of criminal rate than criminal rate in 2013. From 10 cases, 6 cases is get in to the court after investigation, meaning that there is prosecution and justification, the rest of 4 cases is handled by diversion. The Cause factors that children do criminal action one of it is Environment, another factor is the easiness for children to access information about sexual relation which has maturity content, impacting their passion to do sexual intimacy or sexual violation before married with opposite sex. Low social control from society also one of the cause for children to do criminal act, because the lack of control from parent, family and society. In case of handling the children criminal action, the solution model is covered in diversion or let the cases to the next investigation level

Key Words: investigator, children and diversion

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sebagai

Negara hukum minimal harus mempunyai ciri-ciri khas ataupun unsur yang terdiri dari:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.¹

Dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebagai negara hukum, tentunya diharapkan bahwa seluruh sikap tindakan pemerintah dan aparat dalam melaksanakan pemerintahan di semua sektor kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menangani para pelanggar hukum anak, harus didasarkan pada suatu ketentuan hukum yang berlaku, yang mengacu pada hak asasi manusia, yang menurut dasar negara Pancasila tercermin dalam sila kedua yaitu perikemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam perspektif ini, dalam penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak hidup setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan, mengingat seringkali dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan hanya melihat kepentingan proses hukum tanpa memperhatikan kesejahteraan anak. Untuk itu, kita harus memperhatikan dan melayani mereka karena mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik dan sosial. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum seringkali tidak dapat melindungi dirinya sendiri karena situasi dan kondisi.²

Penjatuhan pidana terhadap anak, yang menyebabkan anak berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan

masa pidananya, menyebabkan anak sering berhubungan fisik dan sosial dengan orang dewasa perilaku tindak pidana yang sama-sama tinggal di lembaga pemasyarakatan. Keadaan ini akan semakin menjauhkan harapan si anak untuk berubah menjadi lebih baik, walaupun ada perubahan bagi si anak adalah perubahan perilaku yang meniru lingkungan terdekatnya yakni perilaku orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Teori imitasi dalam kajian kriminologi menjelaskan bahwa perilaku jahat bisa merupakan hasil imitasi atau peniruan atas perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang bergaul secara intensif dengan pelaku.

Dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu:

1. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat;
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman atau kalau ia memang berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat atau tidak seimbang dengan perbuatannya.³

Dengan demikian hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum tersebut, di lain pihak keberadaan Hukum Acara Pidana dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak terjadi kesewenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi terjamin.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative* yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Orientasinya adalah

¹ Sri Sumantri, 2003, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 4, sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 37.

² Sahetapy, J.E., 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 136.

³ Wiryono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 15-16.

merestorasi hubungan pelaku dengan korban dan akibat tindakan pelaku dalam kehidupan masyarakat untuk menjadi utuh atau tidak terluka lagi, dengan melibatkan partisipasi pelaku, korban dan masyarakat. Oleh sebab itu Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, antara lain:

1. Mediasi korban dengan pelanggar;
2. Musyawarah kelompok keluarga;
3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.⁴

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* atau ADR. ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata tidak untuk kasus-kasus Pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.⁵

Pertimbangan terhadap hak-hak anak sebenarnya merupakan pertimbangan moral yang mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Konsekuensi untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Pemeriksaan terhadap seorang anak yang

diduga melakukan tindak pidana harus menjunjung tinggi hak-hak anak. Muncul berbagai konsep-konsep alternatif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain adalah yang dikenal dengan konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.⁶

Ketentuan dalam UU SPPA yang baru, sangat dijiwai oleh upaya perwujudan keadilan restoratif ini, sehingga dalam pasal-pasal yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, mewajibkan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim yang menyidangkan perkara tindak pidana anak diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu, sebelum proses hukum dilanjutkan, apabila diversifikasi yang ditempuh melalui mediasi antara korban dan pelaku gagal dicapai.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sering terjadi di wilayah Polres Balikpapan. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak meliputi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), penganiayaan, pencabulan, serta pencurian. Penyelesaian perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, pada umumnya diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative guna menghasilkan diversifikasi (pengalihan) yang akan menghindarkan anak dari penghukuman.

Namun, dalam beberapa perkara tertentu, sekalipun pelakunya adalah anak, proses hukum tetap berlanjut yang berujung pada penjatuhan pidana terhadap anak. Selain karena gagalnya mediasi antara pelaku dan korban, juga dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang dilakukan anak tersebut, serta rekam jejak anak dalam tindak pidana kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya atau residivis.

Realitas Tindak Pidana oleh Anak di Polres Balikpapan

⁴ Apong Herlina et.al., 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, hlm.354

⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Restoratif Justice: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang, hlm. 2 (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II)

⁶ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, 2004, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, hal 3.20 Reformasi Hukum di Indonesia, 2000. Penyelesaian Sengketa Alternatif, Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia, hlm. 88-94.

Tindak pidana yang pelakunya anak, sebagaimana juga di polres-polres kota besar lainnya di Indonesia, juga banyak terjadi di Polres Balikpapan. Tabel di bawah

menunjukkan jumlah tindak pidana yang dilakukan anak di Polres Balikpapan dalam kurun waktu Tahun 2013 -2014.

Tabel 1.
Jumlah Tindak Pidana Anak di Polres Balikpapan Tahun 2013-2014

NO	TAHUN	JLM KSS ANAK	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH	PENYELESAIAN	
					LANJUT	DIVERSI
1	2013		Pencurian	10	6	4
			Curanmor	9	8	1
			Perbuatan Cabul	20	12	8
			Eksplorasi anak	1	1	-
			Penganiayaan	11	6	5
JUMLAH				51	33	18
2	2014		Pencurian	-	-	-
			Curanmor	-	-	-
			Perbuatan Cabul	9	5	4
			Eksplorasi anak	-	-	-
			Pengeroyokan	1	1	-
JUMLAH				10	6	4

Sumber: Unit PPA Polres Balikpapan Januari 2015.

Penanganan perkara tindak pidana anak ini ditangani khusus oleh Unit Perempuan dan Perkara Anak (PPA), yang keberadaannya ada di setiap polres di seluruh Indonesia. Mengingat perkara tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan dan anak saat ini marak di hampir semua wilayah kota, maka pimpinan Polri membentuk khusus unit PPA di setiap wilayah Polres.

Mengkritisi data jumlah tindak pidana anak yang terjadi di Polres Balikpapan di atas, nampak bahwa jenis kejahatan atau jenis tindak pidana yang dilakukan anak meliputi berbagai jenis kejahatan yang juga dilakukan oleh orang dewasa, seperti pencurian, pencurian kendaraan bermotor, perbuatan cabul dan penganiayaan. Mengingat dalam penelitian ini tidak membahas masalah sebab-sebab anak melakukan kejahatan atau tindak pidana yang merupakan tinjauan kriminologis, maka dalam penelitian ini tidak digali faktor penyebab pelaku yang masih anak-anak melakukan berbagai jenis kejahatan di atas.

Oleh karena masalah dalam penelitian ini adalah mencari jawaban faktor-faktor yang melatarbelakangi penyidik untuk melakukan diversifikasi atau melanjutkan penanganan perkara tindak pidana anak ini ke jenjang sub-sistem peradilan selanjutnya, yakni penuntutan dan persidangan. Sekalipun demikian disadari

bahwa jumlah tindak pidana anak yang dilaporkan dan kemudian ditangani oleh Polres Balikpapan, bukanlah jumlah yang riil atas tindak pidana yang dilakukan anak di masyarakat, mengingat banyak tindak pidana oleh anak yang tidak dilaporkan ke kepolisian. Terutama tindak pidana anak yang terjadi di dalam keluarga.

Dalam kajian kriminologi terdapat istilah *dark numbers*, yakni tindak kejahatan yang tidak dilaporkan oleh masyarakat ke aparat kepolisian sehingga merupakan angka-angka gelap atau tak terdata dalam angka kejahatan resmi (*criminal rate*). Bahkan menurut Mardjono Reksodiputro, angka kejahatan yang tidak dilaporkan dan atau tidak tercatat cukup besar (*the dark number of crime*).⁷ Oleh karena itu dikatakan oleh Mardjono, statistik kriminalitas sebaiknya hanya ditafsirkan sebagai mencerminkan aktivitas dalam sistem peradilan pidana dan jangan sebagai pencerminan kejahatan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan anak yang ditangani di Polres Balikpapan, memang relatif cukup kecil. Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2013

⁷ Mardjono Reksodiputro, 2009, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 328.

hanya terdapat 51 kasus dan pada Tahun 2014 malah turun drastis hanya 10 kasus. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial, maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak-anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Padahal, sekalipun melakukan tindak pidana, anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁸

Dalam kajian kriminologi kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan anak ini diistilahkan sebagai *Juvenile Crime*. Beberapa modus operandi dari tindak pidana yang dilakukan anak, tampak di Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.
Jenis Kejahatan dan Pasal yang dilanggar dalam Tindak Pidana Anak Di Polres Balikpapan Tahun 2014

No	Uraian Kejadian	Tersangka /Inisial	Pasal
1	<u>PERSETUBUHAN DAN ATAU PENCABULAN</u> Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban berulang kali dengan janji akan bertanggung jawab terhadap korban apabila korban hamil.	HFA	Psl 81 dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002
2	<u>PERSETUBUHAN DAN ATAU PENCABULAN</u> Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban sebanyak 1 kali dengan janji akan menikahi korban.	PB	Psl 81 dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002
3	<u>PERSETUBUHAN DAN ATAU PENCABULAN</u> Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban sebanyak 1 kali dengan janji pelaku akan bertanggung jawab kepada korban hingga	RH	Psl 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 subs Pasal 287 KUHP dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Th 2002 subs Psl 290

⁸ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

			KUHP
4	<u>PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN</u> Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban sebanyak 3 kali dengan janji akan bertanggung jawab kepada korban.	AFA	Psl 81 dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002
5	<u>PERSETUBUHAN DAN ATAU PENCABULAN</u> Pelaku mencabuli dan menyetubuhi korban sebanyak 3 kali dengan janji tidak akan meninggalkan korban.	AN	Psl 81 dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002
6	<u>PERCOBAAN PENCURIAN</u> Pelaku memepet motor korban lalu menarik HP korban hingga korban terjatuh lalu pelaku melarikan diri tanpa membawa HP korban.	RS	Pasal 365 KUHP Jo. 53 KUHP
7	<u>PERSETUBUHAN DAN ATAU PENCABULAN</u> Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban berkali-kali dengan janji tidak akan meninggalkan korban.	AD	Psl 81 dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002
8	<u>PENCABULAN</u> Pelaku mengucik-kucik vagina korban dengan menggunakan jarinya.	HGS	Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002
9	<u>PENGEROYOKAN</u> Pelaku yang jumlahnya lebih dari 2 orang melakukan pemukulan terhadap korban.	RMD	Psl 80 UU RI No. 23 Tahun 2002
10	<u>PERSETUBUHAN</u> Pelaku dengan memaksa korban berhubungan badan sebanyak 2 kali dengan bujukan apabila korban tidak mau korban tidak diantar pulang.	ANT	Psl 81 UU RI No. 23 Tahun 2002

Sumber: Unit PPA Polres Balikpapan, Januari 2015.

Berdasarkan data-data yang terdapat dalam tabel di atas, tampak bahwa tindak pidana pencabulan dan persetubuhan paling mendominasi jenis kejahatan yang dilakukan anak yang ditangani di Polres Balikpapan. Dalam beberapa berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi korban yang diteliti peneliti secara acak, terdapat fakta bahwa sebelum tindak pidana pencabulan atau persetubuhan itu terjadi, antara korban dan pelaku memang terdapat hubungan kekasih atau berpacaran sebelumnya. Artinya tindak pidana pencabulan atau persetubuhan itu bukan dilakukan terhadap orang yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali oleh pelaku. Berbeda dengan perkara pencurian

dan pengeroyokan, dimana antara pelaku dan korban tidak saling mengenal sebelumnya.

Data yang sama juga tampak dalam jenis dan modus operandi tindak pidana yang dilakukan anak yang ditangani Unit PPA Polres Balikpapan, sebagaimana Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.
Beberapa Jenis Kejahatan dan Pasal yang dilanggar dalam Tindak Pidana Anak Di Polres Balikpapan Tahun 2013

No	Uraian Kejadian	Tersangka	Pasal
1	PERSETUBUHAN DAN ATAU PENCABULAN Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban secara bergantian dimana pelaku dan korban baru berkenalan serta tidak ada paksaan saat kejadian namun korban masih dibawah umur	IDR	Psl 81 dan/atau Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 subs. Psl 287 dan/atau Psl 290 KUHP
2	PERSETUBUHAN Pelaku berpacaran dengan korban lalu pelaku menyetubuhi korban berkali-kali dengan janji akan bertanggung jawab kepada korban apabila korban hamil.	DS	Psl 80 UU RI No. 23 Tahun 2002
3	PENCURIAN Pelaku masuk rumah korban dengan menggunakan kunci serep milik korban yang telah dicuri juga oleh pelaku lalu pelaku mengambil uang milik korban sebesar 5 juta dan cincin berlian korban senilai 15 juta rupiah	PA dan BA	Pasal 363 KUHP
4	ABORSI Pelapor menemukan orok yang telah dikubur di Pekarangan rumah pelapor.	FWW	Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 56 dan Pasal 346 KUHP
5	PERSETUBUHAN Pelaku dan korban melakukan pesta minuman keras lalu pelaku menyetubuhi korban secara bergantian.	FM, HAC, dan MM	Psl 81 UU RI No. 23 Tahun 2002
6	PENCURIAN Pelaku mengambil barang milik korban tanpa ijin yaitu berupa velg motor.	OCH	Pasal 363 KUHP
7	PENCURIAN Pelaku mengambil barang-barang milik pelapor pada saat kamar kost dalam keadaan kosong ditinggal oleh pelapor bekerja.	RF	Pasal 363 KUHP
8	PENCURIAN Pelaku mengambil sebuah satu unit televisi merk sharp 32" inci dengan memasuki lewat jendela yang tidak terkunci bersama-sama dengan Olenq.	NF	Pasal 363 KUHP
9	EKSPLORASI ANAK Para pelaku mengambil	NM, SP, ZI, dan	Psl 88 UU RI No. 23

	keuntungan dari korban yang disuruhnya menjual keperawannya, keuntungan tersebut digunakan korban dan tersangka untuk keperluannya masing-masing.	NA	Tahun 2002
10	PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN Pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban sebanyak 3 kali, dengan pelaku bilang ke korban "jangan bilang pipimu dan mimimu".	MF	Psl 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 Subs Pasal 287 KUHP
11	PENCABULAN Pelaku membuka pakaian korban langsung memegang payudara dan vagina korban.	PF	Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Subs Pasal 287 KUHP
12	PERSETUBUHAN Pelaku menyetubuhi korban sebanyak satu kali dengan janji akan bertanggung jawab.	TJ	Psl 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 Subs Pasal 287 KUHP
13	PENCABULAN Pelaku mencabuli korban dengan cara mencium pipi dan bibir korban serta mengucik-kucik vagina korban.	ZKF dan PRT	Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Subs Pasal 290 KUHP
14	PENCURIAN Pelaku mengambil sebuah sepeda motor yamaha mio warna hitam yang diparkir didepan rumah saat anak korban sedang bekerja.	DA, AD dan EM	Psl 363 KUHP
15	PENCABULAN Pelaku mencabuli korban dengan memasukkan jari tangan Kedalam vagina korban.	AY	Psl 82 UU RI No. 23 Tahun 2002

Sumber : Unit PPA Polres Balikpapan, Januari 2015.

Tingkat kejahatan atau tindak pidana anak yang berupa pencabulan dan persetubuhan yang tinggi di Polres Balikpapan, tidak terlepas dari keberadaan Kota Balikpapan sebagai kota besar. Sebagaimana kota besar lainnya di Indonesia, pengaruh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, seperti internet, *facebook*, *whats app*, serta instrumen fitur-fitur lainnya di *handphone*, memberikan pengaruh yang besar atau signifikan bagi intensifnya pergaulan anak-anak atau remaja kota besar, yang kemudian mendorong pada pergaulan bebas. Apalagi situs-situs internet yang menyuguhkan pornografi, baik berupa gambar maupun film, cukup mudah diakses melalui jaringan internet di rumah-rumah.

Kondisi ini diperparah dengan maraknya pertumbuhan hotel, losmen atau *guest house* di Balikpapan, yang tidak menerapkan secara ketat aturan hanya suami-isteri yang boleh menginap dalam satu kamar,

sehingga memberikan kemudahan sarana bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan kesusilaan terhadap korbannya.

Hasil wawancara penulis dengan Ketua Unit PPA,⁹ menunjukkan terjadinya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh anak tersebut, malah terjadi di rumah korban atau pelaku. Kenyataan ini menunjukkan kurangnya perhatian orang tua terhadap perilaku anak-anaknya, serta kondisi rumah yang sering kosong karena kesibukan para orang tua dan anggota keluarga dalam urusannya masing-masing, sehingga suasana rumah yang sering kosong tersebut dimanfaatkan anak untuk melakukan pencabulan atau tindak pidana persetubuhan.

Faktor Penyebab Anak melakukan Tindak Pidana atau Kejahatan

Dalam bab Kajian Pustaka sudah dijelaskan panjang lebar tentang teori-teori dalam kriminologi yang membahas tentang sebab-sebab (*etiologi*) kejahatan. Selanjutnya, pembahasan dalam bab ini akan mencoba mengkaji fakta-fakta temuan lapangan hasil penelitian tentang sebab-sebab anak melakukan tindak pidana atau kejahatan, serta relevansinya dengan teori kriminologi yang digunakan.

Sebagaimana diketahui dalam penelitian terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan anak pada Tahun 2014, paling mendominasi adalah perkara persetubuhan dan atau pencabulan (80%), sisanya adalah pencurian dan pengeroyokan. Perkara persetubuhan dan atau pencabulan yang dilakukan anak yang korbannya anak melanggar Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat 1 mengatur setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.- dan paling sedikit Rp. 60.000.000.-. Sedangkan dalam Pasal 81 ayat

2 mengatur bahwa: ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan dalam Pasal 82 diatur "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.- dan paling sedikit Rp. 60.000.000.-.

Ketentuan tersebut mengatur setiap orang, artinya bisa dilakukan oleh orang dewasa, artinya yang berusia di atas 18 tahun, maupun dilakukan anak-anak yang usianya 18 tahun ke bawah. Berdasarkan dua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka yang diteliti dan dijadikan sebagai sampel sumber data sekunder dalam penelitian ini, yakni LP/901/2014/Kaltim/Res. Bpp. Tanggal 22-01-2014 dimana tersangkanya adalah HFA, kelahiran tanggal 7-10-1966, tinggal di Balikpapan, dan korbannya adalah AD, kelahiran tanggal 24-11-1997, serta LP/133/II/2014/Kaltim/Res. BPP Tanggal 01-02-2014, dengan tersangka PB, kelahiran 19-10-1996, tinggal di Balikpapan, dengan korban HAR, kelahiran 26-03-1998, tinggal di Balikpapan.

Dalam kedua perkara ini, tindak pidana yang dilakukan sama yakni persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan berulang kali oleh tersangka terhadap korban dengan janji akan bertanggung jawab abila korban hamil dan menikahi korban. Namun, dalam kenyataannya, setelah diketahui korban hamil, ternyata tersangka tidak mau bertanggung jawab.

Perbedaan antara tindak pidana persetubuhan dengan tindak pidana pencabulan adalah dalam tindak pidana persetubuhan terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, sedangkan dalam tindak pidana pencabulan merupakan tindakan pelaku yang tidak sampai terjadi penetrasi penis ke dalam vagina korban, seperti hanya meraba-raba

⁹ Wawancara dengan Kanit PPA Polres Balikpapan, Ipda Mulyono, tanggal 3 Februari 2015.

vagina korban atau meremas-remas payudara korban atau oral seks. Namun dalam dua perkara yang diteliti ini tindak pidana yang dilakukan tersangka meliputi persetubuhan yang diawali dengan pencabulan.

Dalam konteks KUHP, sebenarnya persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis, yang keduanya belum terikat pada perkawinan dan dilakukan dengan suka rela oleh keduanya, bukanlah tindak pidana. Pasal 284 KUHP hanya mengatur perbuatan zina adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria yang telah menikah, atau seorang wanita yang telah menikah. Sedangkan Pasal 285 KUHP mengatur tindak pidana perkosaan, yakni barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Oleh karena Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan khusus dalam hukum pidana, maka sesuai asas hukum "*lex specialis derogat lex generalis*", artinya ketentuan perundangan yang khusus mengalahkan ketentuan perundangan yang umum, maka terhadap tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan yang korbannya anak, yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku adalah Undang-Undang Nomor RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini.

Berdasarkan keterangan dalam BAP LP/901/2014/Kaltim/Res.Bpp. Tanggal 22-01-2014, tersangka HFA mengaku terdorong untuk melakukan tindakan pencabulan terhadap AD yang masih berusia 17 Tahun, karena sering menonton video porno di rumahnya. Baik melalui VCD maupun lewat situs internet di laptop. Keseringannya melihat film-film porno itu membuat dia ingin melakukan hubungan seks dengan korban, yang merupakan pacarnya, untuk mengetahui rasanya berhubungan seks.

Dalam kajian kriminologi, tokoh kriminolog Sutherland, sebagaimana sudah dijelaskan di Bab II, mengatakan bahwa perilaku kejahatan sebagaimana perilaku yang lain di dalam kehidupan sosial, bisa dilakukan dengan dipelajari (*crime is learning process*). Proses belajar itu bisa dilakukan secara

langsung (*direct learning*) maupun secara tidak langsung (*indirect learning*). Proses belajar langsung terhadap suatu perilaku diperoleh dari interaksi dengan teman sepergaulan yang intim atau akrab (*intimacy friends*). Apabila pola pergaulan pelaku berada dalam asosiasi yang berbeda, artinya yang menerapkan norma-norma perilaku yang berbeda atau menyimpang dengan norma-norma perilaku yang normal di masyarakat, maka pelaku juga akan belajar berperilaku dengan menggunakan norma-norma yang berbeda yang dipelajari dari interaksi dengan kelompok intimnya tersebut. Oleh karena itulah teori Sutherland ini disebut dengan teori '*Association defferential*'.

Ada sembilan jenis yang dipelajari pelaku dari asosiasinya yang berbeda dengan norma-norma umum yang berlaku di masyarakat, diantaranya adalah alasan pembenar untuk melakukan perilaku menyimpang (*deviant behavior*), motif-motif, cara atau modus operandi untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Keterangan tersangka yang menyatakan bahwa teman-temannya juga biasa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan dengan pacarnya, menunjukkan bahwa tersangka memperoleh alasan pembenar untuk melakukan tindakan persetubuhan dan pencabulan itu, serta motifnya berasal dari norma-norma menyimpang yang dipelajari dari interaksi dengan teman-teman sepergaulannya.

Sedangkan proses belajar yang tidak langsung, yakni pelajaran untuk berperilaku menyimpang yang diperoleh pelaku dari sumber-sumber informasi atau komunikasi yang berasal dari film, internet dan media-media sosial. Pengakuan pelaku bahwa nafsunya tergerak untuk ingin melakukan hubungan seksual dan pencabulan dengan korban yang merupakan pacarnya, muncul atau bangkit karena sering melihat film-film porno, baik melalui VCD maupun internet, menunjukkan kebenaran teori Sutherland ini, yang menjelaskan bahwa tindakan kejahatan bisa dipelajari dari sumber-sumber tidak langsung, seperti film atau berita di majalah dan koran, yang memberitakan atau menyuguhkan gambar yang vulgar dan teknik-teknik melakukan kejahatan, seperti perzinahan.

Teknik menggunakan bujuk rayu kepada korban agar mau diajak bersetubuh dan atau berbuat cabul, dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi korban, merupakan teknik-teknik dalam melakukan kejahatan yang bisa dipelajari secara langsung (berupa pemberitahuan temannya dalam pergaulan) atau secara tidak langsung (dari berita di koran atau dialog dalam film). Dalam kaitan ini, penelitian terhadap BAP korban menunjukkan korban mau diajak bersetubuh oleh tersangka, karena terus dirayu dan dirangsang oleh tersangka dengan beberapa tindakan pencabulan, seperti meraba-raba alat vitalnya, sehingga korban pun terangsang, apalagi tersangka berjanji akan menikahnya. Oleh karena korban juga merasa cinta dengan pelaku dan kuatir diputus atau ditinggal oleh pelaku, maka ia bersedia melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan korban.

Sedangkan dalam perkara LP/133/II/2014/Kaltim/Res. BPP Tanggal 01-02-2014, dengan tersangka PB, kelahiran 19-10-1996, tinggal di Balikpapan, dengan korban HAR, kelahirab 26-03-1998, tinggal di Balikpapan, pengakuan PB hampir sama dengan tersangka HFA. Tindakan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan terhadap korbannya yang berhubungan pacaran dengannya, juga karena pengaruh teman-teman dekatnya, yang menceritakan bahwa teman-temannya tersebut sudah terbiasa hubungan seksual atau melakukan persetubuhan dengan pacarnya. Dengan demikian motif untuk melakukan kejahatan tersebut diperoleh dari hasil interaksi dengan teman-teman dekatnya (*intimicacy friend*), yang menurut teori differensi asosiasi dari Sutherland bahwa motif untuk melakukan kejahatan merupakan salah satu hal yang dipelajari dalam interaksi dengan kelompok pergaulan yang intim atau intensif. Demikian juga teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini teknik dalam melakukan persetubuhan, yang bisa dipelajari secara langsung dari teman yang sudah pernah melakukan, maupun secara tidak langsung yang bersumber dari informasi bacaan, film dan internet situs porno yang banyak beredar.

Luasnya peredaran situs-situs porno dalam internet, juga film-film porno yang beredar secara gelap melalui VCD-VCD yang

dijual secara bebas, serta banyaknya informasi tentang masalah-masalah seksual dalam majalah atau koran yang beredar secara luas, sesungguhnya menunjukkan masyarakat saat ini sedang berada dalam kondisi anomi (menurut teori Emile Durkheim), khususnya dalam norma-norma seksual, dimana informasi seksual secara bebas beredar di masyarakat dan secara masyarakat menerimanya atau permisif saja.

Sebagaimana dijelaskan dalam kajian pustaka di depan, masyarakat anomi menurut Emile Durkheim adalah keadaan masyarakat yang *normless* atau kehilangan norma, dimana norma-norma yang lama sudah ketinggalan dengan perkembangan zaman, namun norma-norma baru belum terlembagakan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dalam kaitan dengan informasi tentang seksual, saat ini masyarakat dibanjiri oleh informasi-informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan seksual, baik melalui media elektronik maupun media cetak, yang akhirnya mendorong pada perilaku masyarakat yang kian permisif (menerima) tindakan-tindakan penyimpangan seksual, seperti terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan.

Informasi-informasi tentang seks ini dengan mudah bisa diakses remaja dan anak-anak, yang akhirnya memberikan sosialisasi kepada mereka tentang perihal seks yang semestinya belum waktunya mereka ketahui. Pengetahuan ini apabila tidak difilter dengan ketat oleh pengawasan keluarga dan sekolah serta masyarakat, akan mendorong anak-anak atau remaja mempraktekkan pengetahuan seksual yang diperolehnya itu dengan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, sebagaimana terjadi dalam banyak perkara yang ditangani oleh Polres Balikpapan.

Hasil pemeriksaan penyidikan dalam dua perkara ini menunjukkan bahwa tindakan persetubuhan itu dilakukan di rumah korban dan di hotel. Kenyataan ini menunjukkan lemahnya pengawasan orang tua terhadap pola pergaulan anak-anaknya dan dengan siapa anaknya bergaul. Serta lemahnya kontrol masyarakat yang membiarkan hotel-hotel atau losmen-losmen membolehkan anak-anak yang berlainan jenis menginap atau menyewa kamar dalam satu kamar. Toeri anomi yang

kemudian dikembangkan oleh Rober K. Merton menjelaskan bahwa salah satu model adaptasi dalam masyarakat yang anomi adalah dipilihnya perilaku inovasi, dimana pelaku (dan juga korban) ikut melakukan tindakan menyimpang (dalam hal ini tindakan menyimpang secara seksual), karena perilaku tersebut sudah umum dilakukan oleh anggota masyarakat yang lain, sera masyarakat pun memberikan peluang untuk terjadinya inovasi seperti itu. Apabila perilaku-perilaku yang pada awalnya merupakan penyimpangan inovatif ini terus berlanjut atau terlembaga, maka akan menjadi pola kultural baru dalam perilaku masyarakat, dimana penyimpangan seksual termasuk hubungan seksual sebelum pernikahan menjadi norma yang biasa, sebagaimana yang terjadi di budaya masyarakat Barat, seperti di Eropa dan Amerika Serikat.

Oleh karena dari delapan perkara persetubuhan dan pencabulan yang ditangani Polres Balikpapan selama Tahun 2014, motif dan modus operandinya hampir sama, maka pembahasan terhadap dua perkara di atas, mencukupi atau mewakili untuk menjelaskan sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan persetubuhan dan pencabulan, sedangkan perkara percobaan pencurian, yakni LP/658/VI/2014/Kaltim/ Res. Bpp, tanggal 4-06-2014, modusnya adalah pelaku memepet motor korban lalu menarik hand phone (HP) korban, hingga korban terjatuh lalu pelaku melarikan diri tanpa membawa HP korban, tersangkanya adalah Roman Swanda, kelahiran Tanggal 15-11-1966, tinggal di Balikpapan, sedang korbannya adalah Christine, kelahiran tahun 1977, tinggal di Balikpapan. Tersangka dikenai Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan) junto Pasal 55 KUHP.

Berdasarkan keterangan tersangka dalam BAP, pelaku melakukan tindakan percobaan pencurian dengan kekerasan itu untuk mendapatkan uang karena pelaku tidak bekerja dan juga tidak bersekolah. Pencurian dengan kekerasan ini sudah beberapa kali dilakukan pelaku dan hasilnya juga digunakan untuk bersenang-senang dengan teman-teman pergaulannya. Sedikitnya ada dua teori yang bisa menjelaskan sebab-sebab pelaku melakukan tindak pidana percobaan pencurian

atau tindak pidana pencurian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pertama adalah teori asosiasi differensial sebagaimana yang diutarakan oleh Sutherland, sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab kajian pustaka di depan. Kedua adalah teori kontrol dari Hirschi, yang juga sudah dijelaskan di bab kajian pustaka di muka. Namun yang lebih menonjol adalah teori kontrol sosial ini.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam sebab-sebab kejahatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan anak di muka, dalam tindak pidana percobaan pencurian dan pencurian yang dilakukan pelaku juga dipengaruhi oleh pola interaksi dalam pergaulannya dengan teman-temannya, yang merupakan asosiasi atau perkumpulan yang menjalankan norma-norma yang berbeda dengan yang berlaku secara umum atau normal di masyarakat. Pergaulan pelaku dengan teman-temannya yang biasa melakukan pencurian untuk bersenang-senang, jelas merupakan asosiasi atau perkumpulan yang berbeda atau yang menyimpang dengan pola pergaulan anak-anak seusianya yang normal. Pola pergaulan anak-anak yang umum atau normal yang diterima dalam budaya masyarakat, adalah anak-anak dalam usia sekolah itu yang dilakukan semestinya adalah menempuh pendidikan atau sekolah. Pola pergaulannya adalah di dalam sekolah dan di luar sekolah yang terorganisir dan terlembaga serta sesuai dengan norma-norma umum di masyarakat, misalnya aktif dalam organisasi intra sekolah seperti OSIS, klub olah raga, klub pecinta alam, kelompok belajar dan sebagainya.

Oleh karena pelaku tidak bersekolah, akhirnya pelaku mencari teman-teman seusianya yang tidak bersekolah juga dan akhirnya membentuk asosiasi atau kelompok pergaulan sesama anak tidak bersekolah. Dalam pola pergaulan seperti ini mendorong terjadinya kenakalan remaja atau perilaku menyimpang. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang, diantaranya perilaku alkoholik, atau meminum-minuman keras tetapi tidak berorientasi pada kriminalitas. Selain itu, juga mengembangkan perilaku kekerasan seperti perkelahian, serta perilaku kriminal seperti pencurian, penjambretan dan penodongan. Teknik-teknik, motif dan alasan pembenar

untuk melakukan perilaku menyimpang seperti itu dipelajari dari pola pergaulan yang intim dengan teman-temannya dalam asosiasi atau kelompok pergaulan atau teman bermain (*peers group*), sebagaimana dijelaskan oleh Sutherland.

Tergabungnya pelaku dan teman-temannya dalam asosiasi atau kelompok yang berbeda (*defferential*) ini, bermula karena mereka tidak bersekolah. Menurut pengakuan tersangka, dia tidak bersekolah karena orang tua tidak mampu membiayai. Kondisi karena pelaku yang masih dalam usia sekolah namun dalam kenyataannya tidak bersekolah ini, dalam perspektif teori kontrol dari Hirschi bisa dijelaskan karena pelaku tidak terkait (*attachment*) dengan lingkungan sosial yang semestinya, sehingga pelaku tidak memiliki komitmen (*commitment*) untuk berbuat baik dalam pergaulannya di masyarakat, karena merasa sebagai orang yang terbuang atau tidak terlibat (*involtment*) dalam kehidupan anak-anak atau remaja yang mestinya dialaminya, sehingga mereka tipis penghargaannya pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik nilai agama, hukum atau nilai-nilai norma-norma sosial lainnya (*belief*).

Pertimbangan Penyidik dalam Menentukan Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Berdasarkan Pasal 7 diatur bahwa (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi; (2). Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sebagai pintu gerbang (*gate keeper*) bekerjanya SPPA, maka dalam tingkat penyidikan ketentuan ini tentu saja mengikat penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Demikian juga yang dilakukan oleh penyidik di Polres Balikpapan dalam menangani tindak pidana anak. Perkara-perkara tindak pidana anak diutamakan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restoratif untuk tercapainya

diversi. Namun, dalam beberapa kasus atau perkara penyidik terpaksa meneruskan perkara tindak pidana anak ke proses peradilan selanjutnya dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan khusus yang akan dijelaskan di bawah.

Sebagaimana diketahui pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk terjalannya kembali keharmonisan hubungan antara pelaku dan korban kejahatan, dan secara lebih makro mengembalikan keharmonisan dan kohesi sosial di dalam masyarakat, yang sebelumnya terluka akibat tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku. Oleh sebab itu pelaku diminta untuk ikut bertanggungjawab mengembalikan keharmonisan dan kohesi sosial di masyarakat, tanpa harus melakukan penghukuman kepada pelaku secara pidana.

Upaya untuk mencapai diversifikasi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tersebut dilakukan melalui mediasi penal, yang berbentuk mediasi antara pelaku dengan korban (*victim-offender mediation*), dimana penyidik selaku mediatornya. Oleh karena bentuk yang dipilih adalah mediasi antara pelaku dengan korban, yang kadang juga didampingi anggota keluarga mereka, maka keberhasilan mediasi ini juga sangat tergantung kepada sikap dan kesediaan korban untuk menemukan solusi bersama atas perkara yang terjadi.

Oleh karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) proses diversifikasi wajib memperhatikan Kepentingan korban. Selain kepentingan anak pelaku tindak pidana yang meliputi kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) mengatur kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban dan kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat.

Dalam tindak-tanduk pidana sebagaimana tersebut di atas, tidak wajib

penyidik melibatkan korban untuk memutuskan adanya diversifikasi (Pasal 10 ayat 1).

Selain terhadap tindak-tindak pidana yang disebutkan secara eksplisit dalam pasal 9 ayat (2) di atas, penyidik Polres Balikpapan dalam menangani perkara tindak pidana anak dalam melakukan diversifikasi selalu melibatkan korban/keluarga korban. Upaya diversifikasi diutamakan sebelum proses perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan, oleh karena dalam Pasal 29 ayat 1 diatur bahwa : penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversifikasi. (3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal diversifikasi gagal penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat. Hasil kesepakatan dalam diversifikasi tersebut, harus berupa:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Menurut wawancara dengan kepala unit PPA Polres Balikpapan,¹⁰ langkah pertama yang dilakukan penyidik dalam menangani perkara tindak pidana anak adalah mengkaji apakah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan pelaku melakukan tindak pidana tersebut baru pertama kali atau sudah merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7, apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan tindak pidana yang dilakukannya tersebut merupakan

pengulangan tindak pidana, maka ketentuan undang-undang melarang dilakukannya diversifikasi. Artinya prosesnya harus berlanjut ke tahap penyidikan untuk menghasilkan BAP yang kemudian akan diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.

Namun apabila tindak pidana yang dilakukan anak bukan pengulangan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan ancaman pidana penjaranya di bawah tujuh tahun, penyidik sebagaimana perintah UU SPPA, melakukan upaya diversifikasi terlebih dahulu. Alasan-alasan penyidik melakukan diversifikasi adalah:

- a. Karena alasan hukum, bahwa diversifikasi secara tegas telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 (tentang Sistem Peradilan Perkara Anak) yang mengatur bahwa dalam perkara anak Wajib diupayakan Diversifikasi (Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012);
- b. Karena penyidik berupaya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (Pasal: 5 UU No. 11 tahun 2012), dalam hal ini kepentingan dan masa depan anak sangat menjadi prioritas, jangan sampai proses sidik (atau "pembedaan") malahan menjadi bahan pengalaman anak untuk mengulangi tindak pidananya;
- c. Karena penyidik ingin mengedepankan kepentingan anak sebagai makhluk sosial, sehingga dengan upaya diversifikasi seorang tersangka anak dapat hidup layak dan berkembang dengan tanpa ancaman pidana;
- d. Sebagai upaya membebaskan anak dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat anak;
- e. Adanya peluang dan kesediaan bagi pelaku dan korban untuk bertemu dan saling memaafkan; dan
- f. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mendapatkan keadilan bagi anak.

Terhadap alasan yang terakhir tersebut, mediasi penal mengenalkan bentuk mediasi yang berupa pelibatan masyarakat untuk menemukan titik temu bagi penyelesaian tindak perkara anak di luar pengadilan atau dikenal dengan istilah *community group mediation*. Oleh sebab itu,

¹⁰ Wawancara dengan Kanit PPA Polres Balikpapan, Ipda Mulyono, tanggal 3 Februari 2015.

dalam praktek untuk menemukan diversifikasi terhadap tindak pidana anak, Polres Balikpapan kadang juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Apalagi apabila suku antara pelaku dan korban berbeda, misalnya pelaku berasal dari suku Bugis dan korban berasal dari suku Jawa atau suku Dayak.

Sebagaimana diketahui masyarakat Balikpapan adalah masyarakat pluralis, yang secara sosiologis terdiri dari banyak suku. Diantaranya meliputi suku Dayak, Suku Bugis, Suku Jawa, dan banyak suku lainnya. Oleh sebab itu, guna mencegah agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari suku yang berbeda dengan korban tersebut tidak menjadi pemicu (*trigger*) terjadinya kerusuhan atau konflik antar suku, maka dilakukan mediasi penal yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Selain pelaku dan keluarganya serta korban dengan keluarganya.

Sekalipun demikian, tidak setiap upaya diversifikasi ini mendapatkan hasil sebagaimana diharapkan, artinya seringkali juga gagal atau tidak terjadi perdamaian, karena tidak adanya kesepakatan antara korban (keluarganya) dengan pelaku (keluarganya) tentang substansi atau isi perjanjian perdamaian. Problem yang sering ditemui adalah korban atau keluarganya meminta ganti rugi yang melebihi atau di luar kemampuan korban. Misalnya dalam tindak pidana pencurian sepeda motor, karena motor yang dicuri sudah dijual pelaku dan tidak jelas keberadaannya saat mediasi dilakukan, sedangkan korban dan atau keluarganya menuntut sepeda motor yang baru dengan merk yang sama. Sementara pelaku atau keluarganya hanya sanggup mengganti rugi dengan sepeda motor bekas sesuai tahun produksi sepeda motor yang dicuri. Namun korban menolak. Pada kasus tidak terjadinya kesepakatan ini, setelah masa waktu untuk memperoleh diversifikasi terlewati, yakni 30 (tiga puluh) hari, maka penyidik terpaksa melanjutkan penyidikan dan memproses secara hukum.

Alasan karena proses diversifikasi gagal, merupakan salah satu alasan atau pertimbangan penyidik untuk meneruskan penyidikan pada tahap selanjutnya. Sedangkan pertimbangan penyidik lainnya untuk melanjutkan tindak

pidana anak ke proses peradilan selanjutnya adalah:

- a. Diversifikasi yang pernah disepakati tidak dilaksanakan oleh pelaku (Pasal 13 huruf a dan b UU No. 11 tahun 2012);
- b. Karena ada aturan (hukum positif) yang mengatur, bahwa perbuatan tersangka secara jelas diatur dalam ketentuan peraturan-perundangan, yakni tindak pidananya ancaman pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih dan untuk memberikan kepastian hukum maka proses sidik atau penyidikan tetap dilakukan;
- c. Karena pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, terutama pada kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang berulang, pencurian dengan kekerasan, atau tindak pidana lain yang sangat meresahkan masyarakat, seperti perkosaan dan persetubuhan dengan korban anak, penganiayaan, sehingga ada kekhawatiran bahwa tindak pidana akan terulang lagi, jika perbuatannya terdahulu tidak dilakukan proses sidik; dan
- d. Pelaku merupakan residivis atau tindak pidananya yang diproses penyidik saat itu merupakan tindak pidana kesekian kali yang pernah dilakukan pelaku, sehingga menurut ketentuan UU SPPA dilarang untuk dilakukan diversifikasi.¹¹

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian panjang lebar dalam bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Realitas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Balikpapan pada tahun 2013 sebanyak 51 tindak pidana. Meliputi tindak pidana pencurian 10 perkara; pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 9 perkara; perbuatan cabul 20 perkara; eksploitasi anak satu perkara dan penganiayaan 11 perkara. Dari 51 perkara tindak pidana anak tersebut, sebanyak 18

¹¹ Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Balikpapan, AKP Damus Asa, SH, tanggal 4 Februari 2015.

- perkara diselesaikan melalui model diversifikasi, sedangkan sisanya sebanyak 33 perkara diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Sedangkan tindak pidana anak yang terjadi pada Tahun 2014 di Polres Balikpapan, sebanyak 10 perkara. Artinya mengalami penurunan angka kejahatan (*criminal rate*) yang cukup signifikan dibandingkan perkara yang terjadi pada Tahun 2013. Dari 10 perkara tersebut sembilan perkara merupakan tindak pidana persetubuhan dan atau percabulan, sedangkan satu perkara adalah pengeroyokan. Sebanyak enam perkara diantaranya dilanjutkan dalam proses peradilan selanjutnya setelah penyidikan, artinya dilakukan penuntutan dan persidangan, sedangkan sisanya sebanyak empat perkara dilakukan dengan diversifikasi;
2. Faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan atau tindak pidana, diantaranya karena anak bergaul dalam kelompok yang memiliki norma-norma yang berbeda dengan norma yang wajar atau sah atau legal yang berlaku di masyarakat, dimana dalam pergaulannya ini anak pelaku tindak pidana mempelajari motif, teknik dan alasan pembenaran untuk melakukan kejahatan. Oleh karena tidak ada tindak pidana yang sebabnya tunggal, maka penyebab lainnya adalah adanya kemudahan anak untuk memperoleh atau mengakses informasi-informasi tentang hubungan seksual atau informasi-informasi yang bersifat pornografi, sehingga merupakan sarana tidak langsung bagi pelaku untuk belajar atau mendapatkan pengetahuan seksual, yang kemudian mendorong nafsu syahwatnya untuk melakukan persetubuhan atau percabulan di luar nikah dengan pacarnya, dengan menggunakan bujuk rayu dan atau ancaman, sehingga merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Kontrol sosial yang rendah dari masyarakat juga menjadi faktor penyebab anak mudah melakukan kejahatan, karena kurangnya pengawasan dari orang tua, keluarga dan masyarakat;
  3. Alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan penyidik dalam menentukan

model penyelesaian perkara tindak pidana anak, meliputi:

- a. Alasan untuk menempuh diversifikasi karena:
  - (1) Karena alasan hukum, bahwa diversifikasi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 (tentang Sistem Peradilan Perkara Anak) yang mengatur bahwa dalam perkara anak Wajib diupayakan Diversifikasi (Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012);
  - (2) Karena penyidik berupaya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (Pasal : 5 UU No. 11 tahun 2012), dalam hal ini kepentingan dan masa depan anak sangat menjadi prioritas, jangan sampai proses sidik (atau "pidanaan") malahan menjadi bahan pengalaman anak untuk mengulangi tindak pidananya;
  - (3) Karena penyidik ingin mengedepankan kepentingan anak sebagai makhluk sosial, sehingga dengan upaya diversifikasi seorang tersangka anak dapat hidup layak dan berkembang dengan tanpa ancaman pidana;
  - (4) Sebagai upaya membebaskan anak dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat anak;
  - (5) Adanya peluang dan kesediaan bagi pelaku dan korban untuk bertemu dan saling memaafkan; dan
  - (6) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mendapatkan keadilan bagi anak.
- b. Alasan untuk memilih model melanjutkan perkara ke tahap penyidikan selanjutnya adalah:
  - (1) Alasan karena proses diversifikasi gagal, merupakan salah satu alasan atau pertimbangan penyidik untuk meneruskan penyidikan pada tahap selanjutnya;
  - (2) Diversifikasi yang pernah disepakati tidak dilaksanakan oleh pelaku

- (Pasal 13 huruf a dan b UU No. 11 tahun 2012);
- (3) Karena ada aturan (hukum positif) yang mengatur, bahwa perbuatan tersangka secara jelas diatur dalam ketentuan peraturan-perundangan, yakni tindak pidananya ancaman pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih dan untuk memberikan kepastian hukum maka proses sidik atau penyidikan tetap dilakukan;
  - (4) Karena pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, terutama pada kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang berulang, pencurian dengan kekerasan, atau tindak pidana lain yang sangat meresahkan masyarakat, seperti perkosaan dan persetubuhan dengan korban anak, penganiayaan, sehingga ada kekhawatiran bahwa tindak pidana akan terulang lagi, jika perbuatannya terdahulu tidak dilakukan proses sidik; dan
  - (5) Pelaku merupakan residivis atau tindak pidananya yang diproses penyidik saat itu merupakan tindak pidana kesekian kali yang pernah dilakukan pelaku, sehingga menurut ketentuan UU SPPA dilarang untuk dilakukan diversifikasi.

Saran

Adapun saran-saran yang bisa direkomendasikan adalah:

1. Untuk penegak hukum, agar semaksimal mungkin menempuh upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, sepanjang masih dalam koridor ketentuan UU SPPA, mengingat semangat dan jiwa UU SPPA adalah untuk menjauhkan anak dari penjara atau menjalani penghukuman yang akan menyebabkan anak mengalami trauma dan stigma dari masyarakat dalam kehidupan mereka di masa depan. Menjauhkan masyarakat, terutama anak dari penjara, merupakan misi utama dalam konsep pemolisian sipil (*civil policing*);

2. Agar masyarakat bersama Polri melakukan upaya-upaya pencegahan penyimpangan sosial yang dilakukan anak, baik secara preventif maupun kuratif. Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadi kejahatan. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mendukung program wajib belajar, menanamkan nilai-nilai dan norma-norma, terutama norma agama dan norma hukum secara intensif kepada anak-anak, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, menyediakan bermacam sarana dan prasarana yang menunjang agar para remaja dapat mengalihkan kegiatan buruk, menjalin hubungan personal yang baik antara anak dan orang tua, menciptakan suasana kekeluargaan, melaksanakan aturan dengan konsisten. Tindakan kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi penyimpangan sosial. Tindakan kuratif dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya menghilangkan semua penyebab kejahatan oleh anak atau remaja, melakukan perubahan lingkungan dengan cara mencari orang tua angkat atau asuh, memindahkan anak-anak nakal ke lingkungan sosial yang baik, memberi latihan pada anak remaja untuk hidup mandiri, disiplin, dan tertib, memanfaatkan waktu untuk menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program kejuruan dalam rangka mempersiapkan anak remaja bagi pasaran kerja, memperbanyak lembaga kerja dengan program-program kejuruan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Apong Herlina et.al.**, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief**, 2008. *Restoratif Justice : Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister, Semarang.
- M. Nasir Djamil**, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU*

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 2009, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia*, UNICEF.

Sahetapy, J.E., 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. PT. Eresco, Bandung.

Sri Sumantri, 2003, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, hal. 4, sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui*

Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.

Wiryono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.